

RENCANA REVISI UU PEMILU

Berpedoman pada Rekayasa Konstitusional MK

JAKARTA (KR) - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas memastikan revisi Undang-Undang (UU) tentang Pemilihan Umum (Pemilu) akan berpedoman pada lima rekayasa konstitusional yang telah diberikan Mahkamah Konstitusi (MK).

"Tidak boleh rekayasa konstitusional itu disahkan kepada perolehan suara ataupun kursi. Nah, karena itu pasti ini akan dipenuhi," ujar Supratman saat ditemui usai acara Pencanangan Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas dan Launching Transformasi Digital Kemenkum di Jakarta, Selasa (7/1).

Menkum menegaskan, pihaknya menghormati dan mematuhi putusan MK yang menghapus syarat ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden atau *presidential threshold*, karena dipandang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Putusan MK, katanya, bersifat final dan mengikat, sehingga tidak bisa ada upaya hukum lainnya.

Untuk itu, Menkum telah menginstruksikan Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan (Dirjen PP)

Kementerian Hukum untuk mengkaji putusan MK. Pasalnya, jelasnya, walaupun inisiatif untuk membuat perubahan UU tentang Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) diinisiasi DPR RI, namun Pemerintah tetap harus melakukan persiapan. "Oleh karena itu Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) juga pasti melakukan persiapan," ucap Supratman.

Dalam putusan mengenai *presidential threshold*, Supratman menjelaskan MK tidak serta-merta menghapus ambang batas dan memungkinkan semua partai politik untuk bisa mencalonkan presiden. Namun, ia mengungkapkan, MK telah memberi ruang kepada pembentuk UU, yakni DPR bersama dengan Pemerintah untuk melakukan rekayasa konstitusional dengan mempedomani lima hal.

"Tetapi apakah nanti semua partai

politik masing-masing boleh mencalonkan? Nah, nanti dibahas pada revisi UU tentang pemilu, partai politik maupun pilkada," tutur Menkum.

Di sisi lain, meskipun nantinya tidak ada *presidential threshold*, Menkum menekankan, calon presiden dan wakil presiden (capres dan cawapres) tetap membutuhkan dukungan kuat dari parlemen.

Apalagi, katanya, para capres dan cawapres tetap menginginkan program yang diusungnya bisa mendapatkan dukungan, termasuk pembiayaan dan regulasi, di mana APBN disetujui bersama-sama dengan DPR. "Oleh karena itu dukungan politik di parlemen pasti sangat dibutuhkan. Jadi, semua capres akan melakukan hal yang sama," ujar Supratman.

Sebelumnya, MK memberi lima poin pedoman rekayasa konstitusional (*constitutional engineering*), menyusul penghapusan ketentuan ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden (*presidential threshold*) pada Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. (Ant/Obi)-d

PERINGATAN 'YOGYA IBUKOTA RI' Setiap Jengkal Tanah Adalah Saksi Sejarah

YOGYA (KR) - Kepindahan Ibukota RI dari Jakarta ke Yogyakarta tidak lepas dari visi besar Sultan HB IX dan Paku Alam VIII dalam melihat masa depan Indonesia.

Menurut Penulis Naskah Video Sejarah, Widiasto Wasana Putra, Sultan yang memang terpelajar dan aktif mendengarkan radio-radio luar negeri memahami persis, bahwa kondisi Jakarta tidak kondusif untuk dipakai sebagai ibukota di tengah situasi yang tidak aman.

Sultan juga mengetahui secara persis posisi Yogyakarta sebagai kerajaan di zaman Belanda. Pada masa Belanda, Kraton Yogyakarta berstatus daerah swapraja (*zelfbestuurende landschap*) dalam Hindia Belanda. "Ini satu posisi politik yang memang diakui oleh militer Belanda. Kalau di zaman Jepang disebut sebagai daerah kodi," katanya.

Posisi otonom Yogyakarta ini, lanjut Widiasto, dimanfaatkan betul oleh Sultan HB IX dan Paku Alam VIII untuk ditawarkan kepada Presiden Sukarno agar ibukota sementara waktu pindah di Yogyakarta.

Jadi apabila kemudian Yogyakarta disebut sebagai benteng kedaulatan, menurut Widiasto, karena memang pada saat situasi awal kemerdekaan eksistensi NKRI ini terancam oleh kedatangan kembali Belanda yang ingin menjajah Indonesia, dan Sultan memberikan Yogyakarta sebagai ibukota.

Widiasto mengatakan, hampir setiap jengkal tanah di kota Yogyakarta menjadi saksi sejarah penting. Katakanlah mulai dari kawasan Me-



KR-Wawan Isnanan Widiasto Wasana Putra

rapi, ada sejumlah vila yang pernah dipakai oleh para pemimpin republik untuk melakukan perundingan.

Kemudian di pusat-pusat kota mulai dari Tugu, Malioboro, kawasan kraton dan benteng adalah wilayah yang menjadi medan berpengaruh. Sebuah medan pertempuran dan menjadi saksi sejarah tegaknya kedaulatan RI.

"Saya kira menjadi penting bagi pemangku kebijakan hari ini, khususnya kalangan pendidik, untuk terus mengajarkan pengetahuan sejarah kepada generasi muda mengenai posisi Yogyakarta yang sangat strategis pada masa kemerdekaan," katanya.

Tentu, harapannya generasi muda tidak melupakan dan bisa lebih menghargai situasi zaman pada masa kini yang tidak lepas dari peristiwa sejarah di masa lalu. Apalagi pada saat ini negara sudah banyak melansir momentum kebangsaan yang diperingati

secara rutin.

Menurut Widiasto, menjadi tugas kita generasi sekarang untuk memaknai momentum itu. Termasuk tentunya momentum kepindahan Ibukota RI ke Yogyakarta pada 4 Januari 1946 yang oleh Gubernur DIY Sultan HB X sudah ditetapkan sebagai momentum bagi semua warga Yogyakarta untuk mengingat Yogyakarta untuk mengingat Yogyakarta Republik.

Untuk memperingati peristiwa bersejarah kepindahan Ibukota RI dari Jakarta ke Yogyakarta, Paniradya Kaistimewan DIY dan Asosiasi Guru Sejarah Indonesia (AGSI) DIY mengadakan acara Sinau Sejarah Keistimewaan DIY 'Yogya Ibukota RI', Rabu (8/1), pukul 13.00 - 16.00 di SMA Negeri 2 Wates, Jalan KH Wahid Hasyim No 19, Kabupaten Kulon Progo, dan disiarkan *live streaming* melalui *channel* YouTube Paniradya Kaistimewan DIY.

Sinau sejarah diawali dengan pemutaran video dokumenter '4 Januari' (Yogya Ibukota Republik). Dilanjutkan dialog keistimewaan bertema 'Yogyakarta Ibukota RI: Episode Paling Krusial Antara Hidup dan Matinya RI' dengan narasumber Aris Eko Nugroho SP MSI (Paniradya Pati Kaistimewan DIY), Julianto Ibrahim MHUM (Sejarawan UGM), dan Widiasto Wasana Putra (Penulis Naskah Video Sejarah) dipandu moderator Isye Dewi.

Acara sinau sejarah diakhiri dengan penampilan grup musik, tari dan karawitan siswa SMA Negeri 2 Wates dan bintang tamu grup musik Twelve Midnight. (Wan)

Presiden Evaluasi Proyek Strategis Nasional

JAKARTA (KR) - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan, Presiden Prabowo Subianto akan mengevaluasi Proyek Strategis Nasional (PSN) yang kurang berguna untuk masyarakat.

"Kemudian bagaimana Pak Prabowo juga akan melakukan hal-hal kecil untuk rakyat untuk kemudian bagaimana supaya mengevaluasi yang namanya Proyek-proyek Strategis Nasional yang kurang berguna untuk masyarakat," ujar Sufmi Dasco Ahmad dalam Seminar Pembangunan Indonesia 2025: Harapan

dan Tantangan di Jakarta, Selasa (7/1).

Menurutnya, hal ini tentunya akan membuat sejumlah pihak akan kurang senang dengan langkah pemerintahan tersebut. Namun, lanjutnya, Presiden Prabowo Subianto tetap bertekad bahwa hal tersebut harus dilakukan apapun risikonya. "Dan hal ini tentunya tidak akan atau kemudian akan membuat sebagian ada yang kurang happy dengan pemerintahan. Oleh karena itu Pak Prabowo tetap bertekad bahwa ini harus dilakukan, apapun itu risikonya kita akan jalan,"

katanya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo menegaskan pentingnya pembangunan infrastruktur untuk memperlancar arus transportasi dan memacu pembangunan ekonomi. Kepala Negara juga menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah bekerja keras mewujudkan proyek ini.

Namun, ia mengingatkan bahwa pembangunan infrastruktur harus selalu mengutamakan kepentingan rakyat. "Kita harus tahu bahwa infrastruktur ini adalah dibangun dengan uang rakyat. Saya ingatkan

untuk kesekian kalinya bahwa setiap rupiah uang rakyat harus dipakai digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat," katanya menegaskan.

Presiden juga berpesan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan semua pihak yang terlibat dalam proyek ini, untuk memastikan efisiensi dan kualitas dalam pembangunan. "Yakinkan bahwa semua yang dibangun adalah sesuai spesifikasi, yakinkan bahwa efisiensi dan kualitas dipertahankan, berilah yang terbaik sehingga kemampuan negara dan bangsa

sebesar-besarnya bisa dirasakan manfaatnya oleh rakyat kita," kata Presiden Prabowo.

Sufmi Dasco Ahmad juga mengungkapkan, Presiden melakukan efisiensi terhadap pengeluaran di kementerian dan lembaga

(K/L) negara. "Bagaimana hal-hal kecil yang akan dilakukan oleh Pak Prabowo dalam melakukan efisiensi terhadap pengeluaran ke kementerian dan lembaga. Yang saya kemarin ikuti ada pembelian alat tulis kantor (ATK) untuk seluruh ke-

menterian dan lembaga ini jumlahnya Rp 44,4 triliun, hanya belanja ATK. Hal-hal seperti ini, hal-hal yang kecil yang coba dilakukan oleh Pak Presiden Prabowo melakukan efisiensi di kementerian dan lembaga," kata Dasco. (Ant/San)-f

MENKUM JANJI UMUMKAN NAMA-NAMA MEREKA

44.000 Napi Bakal Mendapatkan Amnesti

JAKARTA (KR) - Sebanyak 44.000 narapidana (napi) akan mendapatkan amnesti (pengampunan atau penghapusan hukuman) dari Presiden Prabowo Subianto. Terkait hal itu Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas berjanji transparan mengenai nama-nama napi yang akan mendapatkan amnesti.

Pemerintah, jelasnya, tetap mempersilakan publik untuk mengontrol siapa saja napi yang akan diberikan kebijakan tersebut. "Nanti kalau dari Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan (Imipas) data sudah ada, pasti kami buka ke publik," kata Supratman saat ditemui wartawan usai acara Pencanangan Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas dan Launching Transformasi Digital Kemenkum di Jakarta, Selasa (7/1).

Meski dikatakan demikian, ia mengaku masih menunggu data nama-nama napi yang akan diberikan amnesti dari Kementerian Imipas. Selain itu, berharap nama-nama para napi rampung pada pekan depan.

Supratman mengungkapkan, hingga saat ini pihaknya terus berkomunikasi dengan Menteri Imipas mengenai progres data tersebut. Untuk itu, ia tidak dapat berbuat apa-apa apabila belum ada basis data napi yang akan diberikan amnesti dari

Kementerian Imipas.

Dituturkan, beberapa saat yang lalu Menteri Imipas menjanjikan dalam waktu dekat nama-nama tersebut segera diserahkan. Namun demikian, Supratman tidak menampik terdapat kemungkinan proses asesmen yang cukup ketat dalam menyeleksi para napi yang akan diberikan amnesti, sehingga membuat daftar nama rampung lebih lama dari perkiraan.

Dengan demikian, lanjutnya, Kemenkum tidak memiliki target tertentu kapan daftar itu bakal rampung. Hal ini karena pihak yang melakukan asesmen dan menentukan napi yang berhak mendapatkan amnesti merupakan Kementerian Imipas.

"Setelah itu, kami teliti dan serahkan kepada Bapak Presiden. Presiden yang akan memutuskan berapa banyak dan siapa yang mendapatkan amnesti," kata Supratman.

Sehubungan hal itu, sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan, pemerintah akan merumuskan kewajiban mengikut program komponen cadangan (komcad) bagi narapidana usia produktif untuk mendapatkan amnesti dari Presiden Prabowo Subianto. (Ful)-d

DALAM SEPEKAN AWAL JANUARI 2025

Kemkomdigi Tindak 43.000 Konten Judol

JAKARTA (KR) - Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) telah menindak sebanyak 43.063 konten, akun, dan situs terkait dan terafiliasi dengan judi online (judol) selama periode sepekan, 1-6 Januari 2025. "Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto serta Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid, penting bagi kita melindungi generasi muda dari konten judol, pinjaman online (pinjol) ilegal dan konten negatif lainnya di ruang digital," kata Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kemkomdigi Molly Prabawaty di Jakarta, Selasa (7/1).

Molly menjelaskan, hasil kolaborasi lintas sektor, aduan masyarakat, laporan instansi/lembaga, dan patroli siber sejak 20 Oktober 2024 hingga 6 Januari 2025, Kemkomdigi menghapus 711.522 konten. Rinciannya meliputi 652.147 website dan IP, 29.964 konten/akun pada platform Meta, 17.836 file sharing, 6.842 pada Google/YouTube, 4.075 di platform X, 435 di Telegram, dan 219 di Tiktok.

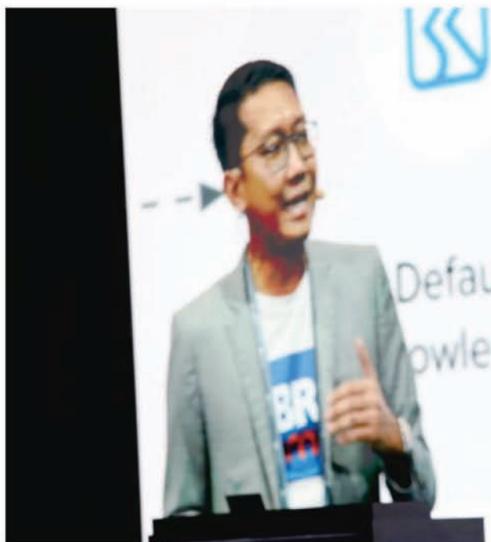
Secara akumulatif, ungkap Molly, terhitung sejak tahun 2017 hingga 6 Januari 2025 Kemkomdigi telah memblokir 5,5 juta

konten terkait judol. "Kami juga memblokir akun yang memiliki jumlah pengikut banyak mulai dari ratusan ribu hingga jutaan pengikut di antaranya akun IG @becandayo (326.000 pengikut), @putridelvasyakira (670.000 pengikut), @hitzmedsos (338 pengikut). Akun-akun tersebut terafiliasi dengan situs dan promosi judol," ujarnya.

Selain penindakan, ia menilai peran semua pihak termasuk orangtua sangat penting dalam pengawasan aktivitas digital. Orangtua didorong lebih aktif memeriksa jenis game yang dimainkan anak-anak serta memastikan bahwa game tersebut sesuai usia agar menghindarkan mereka dari potensi paparan konten yang mengarah pada perjudian. "Mari kita jadikan pengawasan digital sebagai prioritas, agar anak-anak dapat tumbuh dan berkembang dengan sehat, aman, dan bebas dari paparan perjudian yang merusak," kata Molly.

Kemkomdigi mengimbau masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam aktivitas digital dan melaporkan temuan terkait promosi atau konten judol melalui website www.aduankonten.id, WhatsApp: 0811-9224-545, dan Chatbot Stop Judi Online: 0811-1001-5080. (Ant/San)-d

LINDUNGI DATA NASABAH Ini Sederet Upaya BRI Tingkatkan Keamanan Siber



Direktur Digital dan Teknologi Informasi BRI Arga M. Nugraha



KR - Istimedia

JAKARTA (KR) - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) menegaskan bahwa isu serangan ransomware yang sempat beredar tidak berdasar dan telah dibantah oleh pihak berwenang. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) telah melakukan investigasi mendalam terhadap aplikasi, jaringan, dan sistem keamanan BRI, dan tidak menemukan adanya indikasi ransomware atau pelanggaran keamanan data lainnya yang dituduhkan. BSSN juga telah mengonfirmasi bahwa sistem BRI tetap aman dan tidak ada gangguan yang mengganggu layanan perbankan maupun data nasabah. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Menkomdigi Meutya Hafid, yang menyampaikan bahwa hasil asesmen tidak menemukan adanya tanda-tanda serangan ransomware.

Direktur Digital dan Teknologi Informasi BRI Arga M. Nugraha mengungkapkan bahwa perseroan telah memiliki strategi dalam menjaga data nasabah. "Langkah yang dilakukan oleh perseroan mencakup penerapan keamanan digital terkini, pengembangan aplikasi yang terintegrasi dengan praktik keamanan (*DevSecOps practices*), pemantauan keamanan TI secara kontinyu dan *real-time*, penanganan proaktif terhadap celah keamanan (*vulnerability management*), dan pembentukan Tim Tanggap Insiden Keamanan Komputer (*Computer Security Incident Response Team*) yang tersertifikasi oleh BSSN," ujar Arga.

BRI menerapkan cybersecurity framework berbasis NIST (*National Institute of Standards and Technology*) sebagai dasar pengembangan

keamanan digital dan menerapkan *end-to-end security* di semua layanan perbankan digitalnya. Arga mengatakan BRI ke depan akan terus meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai bentuk serangan siber dan memperkuat keamanan digital. "Termasuk dalam hal ini adalah mengalokasikan sumber-sumber daya utama kami untuk penguatan dan pengembangan keamanan digital, yang meliputi aspek teknologi, proses, dan people," ungkap Arga.

Arga menegaskan bahwa dengan berbagai langkah tersebut, BRI berupaya memberikan perlindungan terbaik bagi data dan dana nasabah, serta menjaga kepercayaan yang telah diberikan oleh masyarakat. (*)



Ilustrasi aktivitas teller melayani nasabah di kantor cabang BRI.



Gedung BRI di Jakarta.